

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN  
KONSELING BKBPP (BADAN KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN) KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Aliza Puspita**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COUNSELING CENTER PROGRAM AT BKBPP BANDAR LAMPUNG CITY**

**Oleh**

**ALIZA PUSPITA**

PIK (Information and Conseling Center) is a place that was developed in GenRe' program which managed from from, by and for teenagers/college students to provide services information and counseling about maturation age of marriage. Information and Counseling Center is one of program in BKKBN (Bodies of national population and family planning). The purpose of PIK is giving information about PKBR (Prepartion of life for adolescents) which are maturation age marriage, life skills, counseling service and PKBR reference.

This research purposes is to give an overview whether the purpose of the program have been achived or not. The focus of this research is how does the implementation of Information and Counseling center at BKBPP in Bandar Lampung city. The type of this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this research are interviews, documentations and observations.

The result of research show that the center of information and counseling has been running well, but for human resources and non human resources is still not effective and efficient. So that BKBPP should be adding more human resources for every PIK and pay more attention to facilities and infrastructures that is required for the implementation of PIK.

**Keyword: Public Policy, The Implementation of Public Policy, PIK Program**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN KONSELING BKBPP KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**ALIZA PUSPITA**

PIK (Pusat Informasi dan Konseling) adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe, yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan. Pusat informasi dan konseling merupakan program BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Tujuan dari PIK adalah memberikan informasi PKBR (penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja), pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup (*Life Skills*), Pelayanan Konseling dan Rujukan PKBR.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan dalam pelaksanaan program Pusat Informasi dan Konseling di BKKBP Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling di BKBPP Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pusat Informasi dan Konseling sudah berjalan dengan baik, namun untuk sumber daya manusia dan non manusianya masih belum maksimal karena salah satu PIK dikecamatan tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk itu BKBPP sebaiknya lebih memperbanyak jumlah sumber daya manusianya bagi tiap-tiap PIK yang ada, serta lebih memperhatikan apa saja sarana dan prasarana yang diperlukan untuk terselenggaranya PIK dengan lancar.

**Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Program PIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN  
KONSELING BKBPP (BADAN KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN) KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**ALIZA PUSPITA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT  
INFORMASI DAN KONSELING BKBPP (BADAN  
KEPENDUDUKAN BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN) KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Aliza Puspita*

No. Pokok Mahasiswa : 1216041010

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Meiliyana, S.IP., M.A.**  
NIP 19740520 200112 2 002

**Devi Yulianti, S.AN., M.A.**  
NIP 19850705 200812 2 004

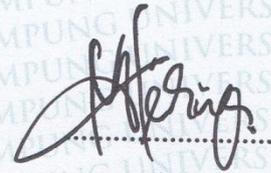
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19750720 200312 1 002

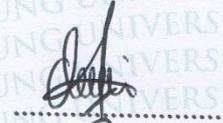
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

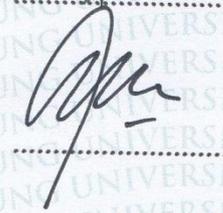
**Ketua : Meiliyana, S.IP., M.A.**



**Sekretaris : Devi Yulianti, S.AN., M.A.**



**Penguji Utama : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP. 19580109198603 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Agustus 2016**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



Aliza Puspita

NPM. 1216041010

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aliza Puspita, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 Juli 1994, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Syahrul Priosusanto, ST. M.Ti dan Ibu Neneng Dewi Kartini, S.Sos. Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur karena dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, kebahagiaan selalu tercurah untuk keluarga ini. Karena doa, dukungan dan semangat dari keluargalah penulis bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk selalu berbakti dan mengutamakan keluarga.

Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Provinsi yang diselesaikan pada tahun 2000, lalu lanjut ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung lulus pada tahun 2006, kemudian dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Selanjutnya penulis diterima menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2012 melalui jalur Ujian Mandiri (UM).

Pada bulan Juli-September 2015 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Way Bungur, Desa Toto Projo. Di sini penulis bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena bisa belajar secara langsung dan bisa menerapkan bidang ilmu penulis kepada masyarakat setempat.

## **MOTTO**

*Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.*

**(Leo Tse)**

*Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.*

**(Nabi Muhammad Saw)**

*Remaja berkualitas adalah penerus bangsa.*

**(Aliza Puspita)**

*Hal yang paling penting dalam kehidupan bukanlah kemenangan namun perjuangan*

**(Aliza Puspita)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT

**Kupersembahkan karya kecil ini untuk yang menyayangiku:**

*Papaku tercinta Syahrul Priosusanto, ST. M. Ti  
mamaku tercinta Neneng Dewi Kartini S. Sos.*

Selalu menjadi sumber inspirasi didalam kehidupanku  
Selalu mendoakan dan mendukung segala aktivitasku hingga sekarang  
Semua curahan kasih sayang yang kalian berikan tidak akan mampu aku gantikan  
dengan apapun.

*Kakakku tercinta Nesya Oktavianti dan Agitia Nabila*

Kehadiran kalian menyempurnakan hidupku  
Semoga kita selalu menjadi kebanggaan orang tua.

*Segenap keluarga yang selalu mendukungku selama ini*

Terima kasih atas semua dukungannya.

**Almamaterku Tercinta Universitas Lampung**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamiin, tercurah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya kepada penulis. Tak lupa shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang motivator bagi penulis untuk selalu ikhlas dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Semoga kita selalu berada dalam junjungan-Nya. Amin. Atas segala kehendak dan kekuasaan dari Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN KONSELING BKBPP KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.AN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan, ketidak sempurnaan, dan berbagai kekurangan, sehingga masih sangat membutuhkan kritik, saran, dan perbaikan dari berbagai pihak. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, terutama untuk keluarga penulis, Papa, Mama, serta kakak-kakakku. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya yang selalu mengingatkan penulis bahwa tidak ada yang tidak mungkin dicapai asalkan kita mempunyai mimpi dan selalu berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2016  
Penulis

Aliza Puspita  
1216041010

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Analisis Program Pusat Informasi dan Konseling BKBPP Kota Bandar Lampung*. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
3. Ibu Melliyan, S.IP, M.A selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, memberikan saran dan masukan dengan sabar serta memberikan perhatiannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Devi Yulianti S.A.N, M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, memberikan

saran dan masukan dengan sabar serta memberikan perhatiannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Nana Mulyana S.IP, M.Si selaku dosen pembahas yang telah memberikan kritik, saran ,dan masukan yang baik serta memberikan perhatiannya kepada penulis.
6. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan proses akademik
7. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA, Bu Yayuk, Bu Meli, Bu Devi, Bu Novita, Pak Noverman, Pak Bambang, Bu Dewi, Pak Simon, Pak Syamsul,Pak Nana, Pak Fery,Pak Eko, Bu Dian, Bu Silvi, Bu Ita, dan Pak Ijul. Terima kasih atas segala ilmu yang telah bapak ibu berikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perjalanan di kampus dapat menjadi bekal yang berharga untuk kehidupan penulis ke depannya. Terima kasih juga untuk Bu Nur sebagai staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan pelayanan bagi penulis dan administrasi di jurusan.
8. Pihak-pihak informan yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data kepada penulis serta seluruh pihak informan yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi, masukan, dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Orang tuaku tercinta, anakmu ini mencoba memberikan yang terbaik untukmu. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku. Terimakasih atas

dukungan moril maupun materil untukku selama ini kepada penulis. Papaku Syahrul Priosusanto, ST. M.Ti Papa yang selalu menjadi sumber inspirasiku, makasih pah buat pelajaran kesabaran yang sangat luar biasa, Papa yang selalu berkorban segala sesuatunya kepada keluarga terlebih kepada penulis, dan mendukung harapan serta keinginan anak-anaknya. Mamaku tersayang Neneng Dewi Kartini, S.Sos. sosok wanita hebat yang senantiasa berdoa bagi kesuksesan disetiap langkah anak-anaknya, yang selalu tiada henti mencurahkan kasih dan sayangnnya kepada keluarga. Makasih mah buat pelajaran keikhlasannya selama ini. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan kedua orang tua yang hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi kedua orang tua yang sangat kusayangi. *Amiiin*.

10. Kakakku tersayang Nesya Oktavianti dan Agitia Nabila. Kehadiran kalian menyempurnakan hidupku. Semoga segala sesuatu yang kita usahakan dapat tercapai dan selalu menjadi kebanggaan papa sama mama. *Amiinn Ya Rabb*.
11. Keluarga besar ku tersayang (kakek-nenek,om-tante,sepupu-sepupu) yang selalu memberikan semangat dihidupku dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk sepupuku terempong Anna Afriana yang senantiasa memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk sahabatku yang tergupek sedari SD Tiara, Ririn, Elly, Mia, dan Amanda, yang selalu menghibur dikala kesedihan datang hehe terima kasih untuk kalian. Untuk sahabat ku Dea Chintia Handari terima kasih karena selalu meluangkan waktu nya untuk mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu direpotkan oleh penulis untuk menemani dan membantu selama proses

bimbingan skripsi ini hingga selesai. Dan juga untuk sahabat-sahabat ku Amel, Eja, Atika, Geby, Persit *Brother and Sister* terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bagi penulis Semoga persahabatan kita akan selalu baik sampai kita mencapai kesuksesan kelak .

13. Untuk sahabatku SMA Utami Putri semangat garap skripsinya biar jadi guru yang berguna bagi Nusa dan Bangsa, semangat biput untuk usaha zailashopnya semoga makin sukses yaa. Serta sahabatku Anisa Nurul Jannah jadi perawat yang baik ya, kerja yang bener nabung untuk modal nikah haha
14. Untuk sahabatku yang tergekil sejak awal perkuliahan yang selalu menemani dan membantu penulis selama menjalani dunia perkuliahan sampai menyelesaikan Skripsi ini. Emi Marta sari tercentil diantara mereka, yang selalu direpotkan oleh penulis yang selalu digupekkin sama yang namanya aliza hehe yang pertama kali ngenalin apa itu “makeup” dari yang bener-bener cuek sama gaya sendiri, makasih emoy udah sabar ngadepin liza ini haha, untuk Tiara Rifany yang selalu direpotkan berhubung rumah deket, maafin ya teng selalu minta tebengan hehe, maafin kita jadi gupek pagi-pagi karna kompre liza haha semangat teng untuk gelarnya, Ayu Tsanita yang selalu direpotkan oleh penulis, yang selalu digupekkin oleh aliza, terima kasih ya mak engkau selalu sabar ngadepin liza yang ngeselin ini haha makasih mak dalam perkuliahan selalu ngutangin pulsa hehe, Ria Shella yang suka ngayal, semoga target nikah tahun depan tercapai ya cel hehe semangat juga untuk sela ngejer gelarnya, pecahin telur di MM ini dulu sel tolong haha. Widji Ramadhani yang paling diem dan penuh misteri tapi tiap ngumpul ada aja ceritanya haha, bul sukses ya untuk kerja di Jakartanya doain kita-kita bisa

nyusul kesana. Amiin. Mutiara Safitri yang mau dilamar abang, yang lagi sibuk nyari rumah haha ditunggu harinya mut, semangat buat garap skripsinya jangan mageran mut!. Yoanita Dewi Masitoh si jawa medok yang cinta banget sama Mesuji, sabar ya yoo proses gak akan ngehianatin hasil, yoo yang punya target nikah muda ditunggu undangannya tapi jangan di Mesuji ya haha, untuk Dianisa biduan pramuka semangat garap skripsinya yan biar bisa nyusul yang lain buru lagi yan jangan mageran! Terima kasih untuk kalian yang selalu menemani disaat proses skripsi ini, disaat perkuliahan, disaat susah maupun senang, pertemanan kita jangan sebatas dunia perkuliahan aja ya guys tetep saling jaga tali silaturahmi hehe, dan semoga kita semua sukses untuk kedepannya. Amiinn. *See You Mahmud!*

15. Untuk teman-teman “Ampera” Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012. Maya Ramadhani, Silvi, Umay, Dilla, Novita, Ayu Widya, Lianse, Alfajar, Dara Virzinia, Putri Wulandari, Frisca, Purnama, Serli, Merita Rahma, Yogi terimakasih atas kesabaran memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Teman-teman ANE012 yang lainnya, Annisa Rachmawati, Novaria, Dian, Stefani, Lenna, Ica, Cibi, Berry, Nadiril, Intan, Gege, Oliv, Ali, Iyaji, Yuyun, Suci, Imam, Icup, Ipul, Ahmad Sulaiman, Ajeng, Merie, Guruh, Ihsan, Kiki, Eko, Rahmadanu, Yuli dan temen-temen ANE 012 yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih atas segala bentuk kebahagiaan yang kalian berikan selama ini.
16. Untuk Agung Febri Rheiza, terima kasih selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih ya rod selalu mendengarkan keluhan, sukses ya buat kita berdua, semoga segala sesuatu yang kita inginkan

tercapai dan selalu diberikan kemudahan untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan! Amiin.

17. Untuk KKN Toto Projo dan Taman Negri Rika Maida, Siti Nur Halimah, Singgih, Abi, Bella Vanessa, Amel, Putri Wijayanti, Safira, Adi, Ageng, Jordi terima kasih untuk kalian yang selalu menghibur selama 3 bulan di Desa Toto Projo.

18. Untuk seniorku Dewinta Fenny Utami dan Maritha Septiana yang banyak membantu peneliti, baik saat kuliah dan saat membantu selama proses bimbingan skripsi ini semoga kalian selalu diberi kelancaran dalam segala urusan, dan untuk semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penelitian dan yang telah menemani penulis selama kuliah di UNILA yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aminn

Bandar Lampung, 8 Agustus 2016

Penulis

**Aliza Puspita**

NPM. 1216041010

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Konsep Kebijakan Publik .....	11
1. Konsep Kebijakan Publik .....	11
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	14
B. Tinjauan Tentang Implementasi Publik .....	17
1. Pengertian Implementasi Publik .....	17
2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik .....	19
C. Tinjauan Program PIK.....	28
1. Program PIK (Pusat Informasi dan Konseling) .....	28
2. Pengelola PIK Remaja .....	29
3. Ruang Lingkup .....	29
4. Tujuan Program PIK .....	29
D. Kerangka Pikir .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	41
F. Teknik Keabsahan Data .....	43

### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

A. Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Bandar Lampung .....	46
1. Profil BKBPP Kota Bandar Lampung .....	46
2. Visi dan Misi .....	47
3. Program PIK (Pusat Informasi dan Konseling) .....	48
4. Tujuan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) .....	48
5. Pelaksanaan PIK .....	52
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	52

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian Penanggulangan Masalah Kenakalan Remaja di Kota Bandar Lampung (Analisis Terhadap Pusat Informasi dan Konseling BKBPP Kota Bandar Lampung) .....	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian Penanggulangan Masalah Kenakalan Remaja di Kota Bandar Lampung (Analisis Terhadap Pusat Informasi dan Konseling BKBPP Kota Bandar Lampung) .....	83

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Kenakalan Remaja .....	4
Tabel 2. Daftar Kecamatan yang aktif dalam menjalankan program PIK .....	6
Tabel 3. Daftar Universitas yang aktif dalam menjalankan program PIK .....	8
Tabel 4. Daftar Informan .....	40
Tabel 5. Daftar Pengelola PIK UNILA .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir .....	35
Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung .....	57
Gambar 3. Pedoman Pusat Informasi dan Konseling .....	62
Gambar 4. Peningkatan Kapasitas SDM Pusat Informasi dan Konseling .....	64
Gambar 5. Fasilitas Pusat Informasi dan Konseling .....	68
Gambar 6. Sosialisasi Pusat Informasi dan Konseling .....	70
Gambar 7. Seminar Kependudukan Keluarga Berencana .....	72
Gambar 8. Pedoman Pusat Informasi dan Konseling.....	74
Gambar 9. PIK Remaja/Mahasiswa .....	75

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b disebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga sangat penting guna meningkatkan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Berdasarkan data dari BKKBN pada tahun 2013 di Indonesia jumlah remaja berusia 10-24 sudah mencapai 64 juta atau 27,6% dari total penduduk Indonesia. Di samping jumlahnya yang besar remaja juga mempunyai masalah yang kompleks seiring dengan masa transisi yang dialaminya. Remaja ialah masa pertumbuhan dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak, tetapi seorang remaja masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Remaja sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan ini pun sering dilakukan melalui coba-coba dan melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya atau orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman

sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas.

Kenakalan remaja menjadi hal yang perlu diwaspadai dan lebih diperhatikan karena seiring berkembangnya seorang anak, bisa dimaklumi jika seorang remaja melakukan sebuah kenakalan, selama kenakalan itu masih pada tingkat yang wajar. Misalnya, tidur pada saat jam belajar, bertengkar dengan teman sebayanya, merokok, tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Namun, jika kenakalan tersebut sudah sampai mengganggu dan dapat merusak diri remaja tersebut seperti misalnya, meminum-minuman keras, sampai sex bebas (*free sex*) yang dilakukan tanpa rasa bersalah maka hal tersebut sangat perlu untuk diatasi. Hal itu mungkin saja terjadi karena tidak adanya pengawasan orang tua, atau kurangnya perhatian dari orang tua serta banyaknya faktor-faktor yang membuat remaja memasuki dunia pergaulan yang rusak. Biasanya hal ini berawal dari mereka berteman dengan teman yang membawa dampak buruk, karena masa remaja itu masa di mana keadaan psikis remaja bisa mudah terpengaruh. Contohnya saja bila ada seorang remaja yang kemudian terpengaruh pergaulan bebas, hampir bisa dipastikan dia tidak akan memiliki masa depan cerah, hidupnya akan hancur perlahan dan tidak sempat memperbaikinya. Akhirnya akan timbul kriminalitas yang bisa menjadi salah satu dampak kenakalan remaja yang terjebak hal-hal negatif. Bukan tidak mungkin setelah itu remaja akan memiliki keberanian untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri demi uang atau merampok untuk mendapatkan barang berharga.

Faktor terpenting yang membuat remaja mudah terjerumus di pergaulan bebas karena kurangnya pemahaman agama yang membimbing pikiran dan jiwa anak. Karena itu, pendidikan dasar agama pada anak sangat diperlukan dalam kehidupan. Berhasil atau tidak berhasilnya seorang anak, kembali lagi pada peran keluarga dalam memberikan pendidikan agama dan pada diri anak sendiri.

Dampak dari kenakalan remaja jika tidak segera ditangani remaja tersebut akan tumbuh menjadi sosok yang bekepribadian buruk. Misalnya, menggunakan barang haram seperti narkoba dan minuman beralkohol yang akan berdampak pada kesehatannya. Oleh karena itu peran orang tua dalam mendidik seorang anak apalagi remaja sangat diperlukan untuk penanaman nilai, dan norma yang diberikan sejak dini agar dapat mempengaruhi sikap, perbuatan mental seorang anak. Sehingga kemudian mereka dapat memilah mana hal yang perlu ditiru, dan mana hal yang tidak patut ditiru, pada intinya seorang anak dapat melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apabila peran orang tua tidak maksimal sejak anak masih kecil, pada saat tumbuh menjadi seorang remaja pun tidak menutup kemungkinan seorang remaja berbuat hal yang melanggar aturan.

(Sumber: *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa PIK Remaja/Mahasiswa*, [www.ceria.bkkbn.go.id](http://www.ceria.bkkbn.go.id))

Provinsi Lampung merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara yang terkenal sebagai kota metropolitan di mana seperti lazimnya kota besar sangat banyak kenakalan remaja yang terjadi di sana. Secara geografis Provinsi Lampung juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa melalui darat. Sehingga besar sekali kemungkinan

remaja di Kota Bandar Lampung terpengaruh hal-hal yang tidak baik dari kota besar seperti Kota Jakarta, atau terpengaruh hal yang tidak baik dari pendatang yang masuk ke Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Menurut data dari Lembaga Pemasyarakatan Anak banyak kenakalan remaja yang terjadi di Bandar Lampung. Berikut ini merupakan data jumlah kenakalan remaja yang terjadi di Bandar Lampung:

**Tabel 1. Data Jumlah Kenakalan Remaja di Bandar Lampung**

No	Jenis Kasus	Lembaga Pemasyarakatan Anak Bandar Lampung
1.	Pencurian/Perampokan	49 Anak
2.	Pelecehan Seksual	19 Anak
3.	Narkotika	27 anak
4.	Penganiayaan/Pembunuhan	3 Anak
5.	Perkelahian/Tawuran	7 Anak
6.	Pemerasan/Pengancaman	3 Anak
	TOTAL	108 Anak

Sumber: *Lembaga Pemasyarakatan Anak 2015*

Dari data di atas masih banyaknya kenakalan remaja di Kota Bandar Lampung. Apabila seorang remaja hanya melakukan tindakan yang hanya sebatas kenakalan, maka harus diberi nasihat, tetapi jika seorang remaja melakukan tindak pidana maka pihak berwajib yang akan mengenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-undang yang ada.

Untuk mengatasi masalah kenakalan remaja tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas remaja agar menjadi generasi yang

baik dengan cara membuat suatu program, salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani masalah remaja ini adalah program PIK (Pusat Informasi dan Konseling) untuk mencegah kenakalan pada remaja yang seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam mencegah terjadinya kenakalan di kalangan remaja. PIK Remaja/Mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (Generasi Berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR yang merupakan 3 resiko yang dihadapi oleh remaja yaitu (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Keberadaan dan peranan PIK R/M dilingkungan remaja/mahasiswa sangat penting artinya dalam membantu remaja/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa.

Maka dari itu BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengadakan program PIK yang bertujuan untuk memberikan informasi PKBR (penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja), pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup (*Life Skills*), pelayanan konseling dan rujukan PKBR khususnya di Bandar Lampung. PIK ini sendiri sudah berjalan sejak tahun 2011 namun keadaan yang masih saja belum banyak berubah, maka dari itu peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan.

PIK ini sendiri sudah diterapkan di berbagai kecamatan dan Universitas di Kota Bandar Lampung. Program PIK yang diterapkan di beberapa kecamatan dan Universitas di Bandar Lampung bertujuan mengajak para remaja untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, serta bertujuan memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), Pelayanan Konseling dan Rujukan PKBR, melalui PIK Mahasiswa/Remaja ini atau Pusat Informasi Dan Konseling. Berikut adalah daftar nama kecamatan dan Universitas yang aktif dalam menjalankan program PIK:

**Tabel 2. Daftar Kecamatan yang Aktif Dalam Menjalankan Program PIK**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA PIK R/M & ALAMAT PIK R/M	AKTIF/ TIDAK AKTIF	JUMLAH ANGGOTA YANG AKTIF IKUT KEGIATAN
1	T. BETUNG UTARA	PRAJA MUDA (KELURAHAN GULAK GALIK)	A	10
		MERPATI (KELURAHAN KUPANG KOTA)	A	10
2	BUMI WARAS	CAHAYA MUDA (KELURAHAN BUMI WARAS)	A	20
3	KEMILING	AL-MUTAQIN (KELURAHAN KEMILING PERMAI)	A	23
		BERINGIN (KELURAHAN BERINGIN RAYA)	A	10
4	RAJABASA	HARAPAN MUDA (KELURAHAN RAJABASA)	A	20
		TUNAS MUDA (KELURAHAN RAJABASA JAYA)	A	35
		RESPECT AND ADVOCATION YOUTH ASSOCIATION (JL.	A	25

		PROF. DR. SUMANTRI)		
5	T. KARANG BARAT	MAWAR (KELURAHAN SUKAJAWA) ANGGREK (KELURAHAN SUKAJAWA BARU) MELATI (KELURAHAN SUKAJAWA)	A  A  A	7  6  5
6	TANJUNG SENENG	ASTER KELURAHAN PERUM WAY KANDIS)	A	10
7	T. KARANG PUSAT	CANTIK MANIS (KELURAHAN KALIAWI) CAFE CURHAT GENOSPIAN (SMPN 9 B.LAMPUNG)	A  A	10  17
8	T. BETUNG TIMUR	AL-MUHAJIRIN (KELURAHAN KOTA KARANG)	A	24
9	KEDATON	TUNAS MELL (KELURAHAN SURABAYA) TUNAS HARAPAN (KELURAHAN PENENGAHAN)	A  A	10  10
10	LABUHAN RATU	HARAPAN MANDIRI (KELURAHAN KOTA SEPANG)	A	10
11	SUKARAME	CERIA (KELURAHAN SUKARAME) JUNIOR SAHABAT (KELURAHAN KORPRI JAYA) PERMATA HATI (KELURAHAN SUKARAME BARU)	A  A  A	20  15  17
12	T.BETUNG BARAT	TUNAS BANGSA (KELURAHAN TUNAS BANGSA BARAT) INSANI (KELURAHAN TB. BARAT) AL-JAFAR (KELURAHAN TB. BARAT)	A  A  A	10  10  10
13	WAY HALIM	SEHATI (KELURAHAN WAY HALIM) SAHABAT (KELURAHAN WAY HALIM)	A  A	20  15
14	ENGGAL	AL-ISLAH (KELURAHAN T.KARANG)	A	11

		NURUL HAYAT (KELURAHAN PELITA)	A	11
		ISTANA CURHAT (KELURAHAN RAWA LAUT)	A	32
15	T. BETUNG UTARA	PRAJA MUDA (KELURAHAN GULAK GALIK)	Kurang Aktif	10
		MERPATI (KELURAHAN KUPANG KOTA)		10
16	LANGKAPURA	AL AMIN (KELURAHAN LANGKAPURA)	A	10
17	PANJANG	GARSIKA (KELURAHAN KETAPANG)	A	15
		YPPL (KELURAHAN MARITIM)	A	15
18	TANJUNG KARANG TIMUR	SMK YAPENA (KELURAHAN KOTA BARU)	A	20

Sumber: *Laporan Kegiatan PIK, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2015*

**Tabel 3. Daftar Universitas yang Aktif Dalam Menjalankan Program PIK**

NO	NAMA UNIVERSITAS	NAMA PIK R/M	AKTIF/ TIDAK AKTIF	JUMLAH ANGGOTA YANG AKTIF IKUT KEGIATAN
1	UNIVERSITAS LAMPUNG	PIK RAYA	A	75
2	IBI DARMAJAYA	SEHATI	A	40
3	UM LAMPUNG	WARDA	A	20
4	IAIN	SAHABAT	A	35

Sumber: *Laporan Kegiatan PIK, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2015*

Berdasarkan data di atas program PIK telah dilaksanakan di 18 kecamatan dan universitas yang ada di Kota Bandar Lampung. Semua program yang dilaksanakan di setiap kecamatan dan universitas berjalan secara aktif dalam pelaksanaan program PIK ini BKKBN dibantu oleh tenaga pengelola PIK R/M (Remaja/Mahasiswa) untuk memudahkan para remaja berbagi cerita berbagi pengalaman serta bertujuan memberikan informasi PKBR.

Program PIK ini sendiri dibuat karena adanya masalah pada remaja, sehingga pemerintah membuat suatu program PIK untuk mengurangi atau mencegah kenakalan pada remaja. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:99) menjelaskan bahwa dalam teori beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Di dalam implementasi indikator karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial ekonomi politik merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan karena sangat berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi itu sendiri. Kualitas remaja di Kota Bandar Lampung ini belum menunjukkan hal yang baik, hal ini dapat dilihat dengan kenakalan-kenakalan yang sering terjadi di Kota Bandar Lampung. Karakteristik agen pelaksana yang dijalankan oleh pihak pelaksana sudah cukup baik untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut serta dalam menyampaikan komunikasi kepada para remaja sudah cukup baik dan didalam menjalankan sebuah program tentunya harus mempunyai sumber daya yang memadai untuk mendukung dalam berjalannya program tersebut. Dalam penerapan program PIK di Kota Bandar Lampung, peneliti menilai kondisi sumber daya manusia sudah cukup baik, namun masih diperlukannya sumber daya non manusia untuk menunjang penerapan program PIK ini. Selain itu, perlu adanya dukungan dari kondisi sosial ekonomi politik dari remaja itu sendiri. Terlaksananya program PIK ini diharapkan dapat menjadikan para remaja yang berkualitas serta bertingkah laku yang baik untuk menghadapi masa depan yang lebih berkualitas, serta mengurangi tingkat kenakalan remaja yang ada di Kota Bandar Lampung.

Untuk dapat melaksanakan target tersebut, harus ada beberapa kebijakan atau strategi yang dilakukan untuk menangani masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN KONSELING BKBPP KOTA BANDAR LAMPUNG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah: “Bagaimana implementasi PIK dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kota Bandar Lampung?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan peneliti adalah untuk menganalisis implementasi program PIK.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai tambahan referensi penelitian di bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang implementasi kebijakan publik.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat BKKBN Kota Bandar Lampung selaku pelaksana kebijakan agar dapat meningkatkan keberhasilan dalam mengkomunikasikan dan memberikan penyuluhan tentang program PIK.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

#### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye dalam Subarsono (2011:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

Friedrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Suharto (2008:3) kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya mengatur aparatur

negara, melainkan juga *governance* yang menyuruh pengelola sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan atau teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Demikian pula pendapat Thomas Dye dalam Subarsono (2011:2) yang mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan pemahaman tersebut, kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana dikatakan Raksasataya dalam Islamy (2001:19) mengemukakan bahwa suatu kebijakan harus membuat elemen-elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Mengidentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik, di mana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan strategi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik diimplementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan PIK termasuk kebijakan publik yang bertujuan untuk memberikan informasi PKBR

(Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), Pelayanan Konseling dan Rujukan PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja).

Kebijakan PIK merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat terutama kepada para remaja, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan pemahaman tersebut, kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

## **2. Tahap-Tahap Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut Dunn dalam Winarno (2002:28-30) adalah sebagai berikut:

### **a. Tahap Penyusunan Agenda**

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada akhirnya,

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

#### b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

#### c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

#### d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### e. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Beberapa paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan (masalah) publik yang layak untuk dibahas dalam tahapan berikutnya, yaitu tahap formulasi kebijakan, setelah diformulasikan, pada tahap adopsi kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik.

Selanjutnya kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Pada akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan akan menilai ketepatan, manfaat, dan efektivitas

hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

## **B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Suharto (2008:169) Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public services*). Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan hal apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.

Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konstitusi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Sejalan dengan adanya yang di ungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:64) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Definisi di atas, menekan pada implementasi yang tidak hanya melibatkan badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus *Webster* yang dikutip oleh Wahab (2005:64) adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sedangkan pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:101-102) implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sejalan dengan kutipan di atas maka menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:101-102) bahwa implementasi adalah suatu yang dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum berbagai aktor, organisasi,

prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai implementasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan atau program yang akan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Karena implementasi akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Model-Model Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2002:101-102) implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Sekalipun banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi kebijakan, namun dalam hal ini hanya akan menguraikan beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli.

Berikut beberapa model-model implementasi kebijakan dari beberapa ahli:

- a. Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Winarno (2002:101-102) model mereka ini kerap kali oleh para ahli disebut

sebagai “*The top down approach*”. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2002:101-102), untuk dapat di implementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana yang tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Beberapa kendala atau hambatan pada saat implementasi kebijakan seringkali berada di luar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksanaan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik. Adapula kemungkinan hambatan tersebut bersifat politis, dalam artian bahwa baik kebijakan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak diterima atau tidak disepakati oleh berbagai pihak yang kepentingannya terkait. Kendala-kendala semacam itu cukup jelas dan mendasari sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh para administrator guna mengatasinya. Dalam hubungan ini yang mungkin dapat dilakukan para administrator ialah mengingatkan bahwa kemungkinan-kemungkinan semacam itu perlu dipikirkan matang-matang sewaktu merumuskan kebijakan.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Syarat kedua ini sebagai tumpang tindih dengan syarat pertama, dalam pengertian bahwa kerap kali muncul di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Jadi kebijakan yang dimiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan

yg diinginkan. Alasan yang biasanya dikemukakan ialah terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya ialah bahwa para politis kadang kala hanya peduli dengan pencapaian tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana untuk mencapainya, sehingga tindakan-tindakan pembatasan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena sumber-sumber yang tidak memadai.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Persyaratan ke tiga ini lazimnya mengikuti persyaratan kedua, dalam artian bahwa di satu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan dan di lain pihak pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan di antara sumber-sumber tersebut harus benar-benar dapat disediakan.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran telah diimplementasikan secara asal-asalan, melainkan karena kebijakan tidak tepat penempatannya.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kenyataan program pemerintah, sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih kompleks dari pada sekedar berupa jika X dilakukan, maka terjadi Y dan mata rantai kualitas hubungannya hanya sekedar jika X, maka terjadi YY, dan jika Y terjadi maka diikuti oleh Z. Kebijakan-kebijakan yang hubungan sebab akibatnya tergantung

pada mata rantai yang amat panjang maka akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik di antara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implementasi yang sempurna menurut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal untuk keberhasilan misi yang diembannya tidak perlu tergantung pada badan-badan lain kalupun dalam pelaksanaannya harus melibatkan badan-badan instansi-instansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan serangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu melainkan juga kesepakatan terhadap setiap tahapan di antara sejumlah besar pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan Implementasi program bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan yang penting keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasinya. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik dan yang lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung serta mampu

berperan selaku pedoman dengan mana pelaksanaan program dapat dimonitor.

8. Tugas-tugas diperinci ditempatkan dalam urutan yang tepat. Persyaratan ini mengandung makna bahwa mengfayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. Kesukaran-kesukaran untuk mencapai kondisi Implementasi yang sempurna ini tidak dapat kita hindari lagi. Disamping itu juga diperlukan bahkan dapat dikatakan tidak dapat dihindarkan keharusan adanya ruangan yang cukup bagi kebebasan bertindak dan melakukan improvisasi, sekalipun dalam program yang telah dirancang secara ketat. Komunikasi dan kordinasi sempurna. Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan kordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur dan badan yang terlibat dalam program.
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
10. Persyaratan terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi loyalitas penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap pemerintah dan siapapun dalam sistem administrasi itu. Apabila terdapat potensi penolakan terhadap pemerintah itu maka ia harus dapat diidentifikasi oleh kecanggihan sistem informasinya dan dicegah sendiri mungkin oleh sistem pengendalian yang handal.

b. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:99):

Horn dan Meter dalam Subarsono (2011:99) teori beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:99) ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen Implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam Implementasi program perlu dukungan dan kordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

#### 5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik atau mendukung Implementasi kebijakan.

#### 6. Disposisi Implementor

Disposisi ini mencakup tiga hal, yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) kognisi yakni pemahan terhadap kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sementara menurut George C. Edwards III ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain:

##### a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, kerersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Agustino (2008:150), menjelaskan bahwa ada tiga indikator yang dapat

digunakan dalam mengukur faktor komunikasi Edward. Indikator tersebut antara lain:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Kejelasan

Komunikasin yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu,para pelaksana memburuhkan flexsibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsisten

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi harus lah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika pemerintah yang diberikan berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

#### b. Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk pelaksanaan kebijakan secara efektif.

#### c. Disposisi

Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk pelaksanaan kebijakan publik tersebut kecakapan saja tidak mencukupi tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

#### d. Struktur organisasi

Menurut George Edward III dalam Nugroho (2011:636) menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *byreaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi infektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga Negara atau pemerintah.

Menurut George Edward III dalam Agustino (2008:153) dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah: Melakukan *standar operating procedure* (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksanaan kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Variabel-variable kebijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana yang meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan. Pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang telah mengoperasionalkan program di lapangan.

Dari beberapa model implementasi di atas, model implementasi dari Van Meter dan Van Horn inilah yang akan digunakan penulis dilapangan untuk menganalisis program PIK (Pusat Informasi dan Konseling) dalam menangani masalah kenakalan remaja. Alasan penulis menggunakan model ini karena variable ataupun indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn merupakan variable yang bisa menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih kongkrit dalam menjelaskan proses implementasi sebenarnya.

### **C. Tinjauan Program PIK (Pusat Informasi dan Konseling)**

#### **1. Program PIK (Pusat Informasi dan Konseling)**

Pengertian Program PIK (Pusat Informasi dan Konseling)

Program PIK adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi Program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja dimaksud, yakni mempraktekkan hidup secara sehat (*practice healthy life*). Empat

bidang kehidupan lainnya yang akan dimasuki oleh remaja sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya remaja mempraktekkan kehidupan yang sehat. Dengan kata lain apabila remaja gagal berperilaku sehat, kemungkinan besar remaja yang bersangkutan akan gagal pada empat bidang kehidupan yang lainnya penyiapan kehidupan berkeluarga. (sumber: [www.ceria.bkkbn.go.id](http://www.ceria.bkkbn.go.id))

## **2. Pengelola PIK Remaja**

Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan menggunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup PIK Remaja meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat remaja.

## **4. Tujuan Program PIK**

PIK Remaja bertujuan untuk memberikan informasi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), Pelayanan Konseling dan Rujukan PKBR.

Pengertian dan Batasan :

- a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK Remaja adalah nama generik. Untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja, nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.
- b. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi, komponen, dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual.
- c. PKBR adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu Remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko TRIAD KRR (Sexualitas, Napza, HIV dan AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.
- d. TRIAD KRR adalah 3 resiko yang dihadapi oleh remaja yaitu resiko-resiko yang berkaitan dengan Sexualitas, Napza, HIV dan AIDS.
- e. Resiko Sexualitas adalah sikap dan perilaku seksual remaja yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual (IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, dan resiko perilaku seks sebelum menikah.

- f. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, yaitu virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia.
- g. AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, yaitu kumpulan dari berbagai gejala penyakit akibat turunya kekebalan tubuh individu yang didapat akibat HIV.
- h. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, yaitu zat-zat kimiawi yang dimaksudkan ke dalam tubuh manusia baik secara oral (melalui mulut), dihirup (melalui hidung), atau disuntik yang menimbulkan efek tertentu terhadap fisik, mental, dan ketergantungan.
- i. Remaja (*Adolescent*) adalah penduduk usia 10-19 tahun (WHO); Pemuda (*Youth*) adalah penduduk usia 15-24 tahun (UNFPA); Orang Muda (*Young People*) adalah Penduduk usia 10-24 tahun (UNFPA dan WHO); Generasi Muda (*Young Generation*) adalah penduduk usia 12-24 tahun (*World Bank*). Remaja sebagai sasaran program PKBR adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.
- j. Pendidik Sebaya PKBR adalah remaja yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan Pendidik Sebaya PKBR dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum Standar yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis.
- k. Konselor Sebaya PKBR adalah Pendidik Sebaya yang punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling PKBR bagi kelompok remaja sebayanya yang telah mengikuti pelatihan konseling PKBR dengan

mempergunakan Modul dan Kurikulum Standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis.

- l. Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan menggunakan Modul dan Kurikulum Standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya.
- m. Pembina PIK Remaja adalah seseorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah remaja, memberi dukungan dan aktif membina PIK Remaja, baik yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kepemudaan/remaja lainnya.
- n. Pendidikan PKBR adalah suatu proses penyampaian informasi atau pendidikan PKBR yang dilakukan oleh Pendidik Sebaya untuk membantu remaja sebayanya dalam memahami tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.
- o. Konseling PKBR adalah suatu proses konsultasi dimana seorang Konselor Sebaya membantu remaja sebayanya untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan PKBR.
- p. Tegar Remaja adalah remaja-remaja yang menunda usia pernikahan, berperilaku sehat, terhindar dari resiko Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

q. Keterampilan Hidup (*LifeSkills*) menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 adalah pendidikan non formal yang memberikan keterampilan non formal, sosial, intelektual/akademis, dan vokasional untuk bekerja secara mandiri. *Life Skills* yang dikembangkan dalam program PKBR lebih ditekankan pada Life Skills yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan (*vocational*), dan keterampilan menghadapi kesulitan. (Sumber: *Panduan Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIK R/M*)

#### **D. Kerangka Pemikiran**

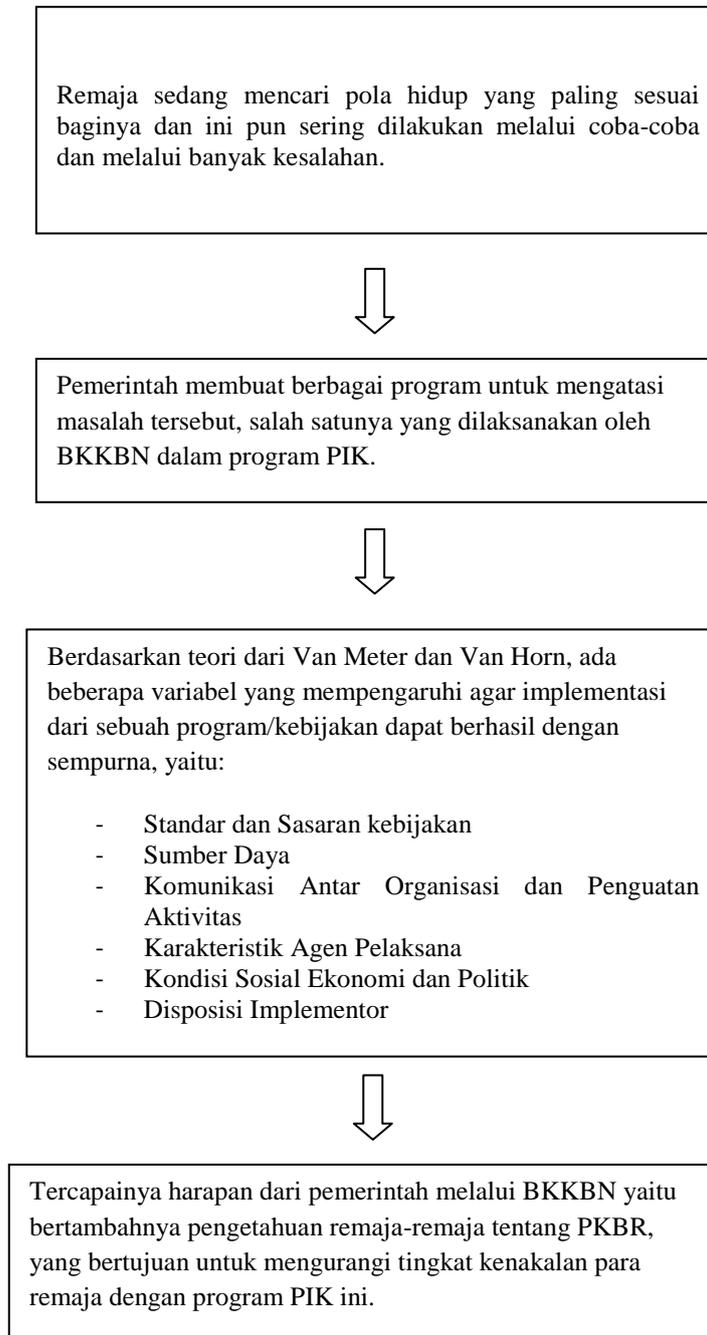
Suatu penyimpangan terhadap para remaja yang dapat merusak masa depan mereka contohnya saja yang dapat kita lihat seorang remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas, atau mabuk-mabukan, serta terjerumus dalam narkoba yang tentunya hal itu dapat merusak masa depan mereka.

Dalam menjalankan peraturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b yang menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga maka BKKBN menjalankan sebuah program yang bernama PIK. Melalui program PIK yang dilaksanakan oleh pihak BKKBN, yang bertujuan untuk memberikan informasi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*life skills*). Dengan adanya pelaksanaan program tersebut, berdasarkan teori Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:99) ada beberapa variabel yang mempengaruhi agar implementasi dari sebuah program/kebijakan dapat berhasil dengan sempurna, yaitu:

- a. Standar dan Sasaran kebijakan.
- b. Sumber Daya
- c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas
- d. Karakteristik Agen Pelaksana
- e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
- f. Disposisi Implementor

## E. Kerangka Pikir

**Gambar 1. Model Kerangka Pikir**



*Sumber :Diolah oleh peneliti 2015*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2011:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi antara tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar, 2009: 78).

Metode ini digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi Sugiyono (2011: 5-10). Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif deskriptif ini dikarenakan penelitian yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi yang secara alamiah serta menggunakan data yang diambil secara langsung atau dari peneliti lain yang hasilnya akan dijabarkan dengan penjelasan-penjelasan mengenai implementasi program PIK

(pusat informasi dan konseling) dalam menangani masalah kenakalan remaja khususnya di Kota Bandar Lampung.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono (2011:207) batasan masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan dan pengamatan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dengan variable yang terdapat dalam Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2011:99) yang antara lain meliputi:

### **a. Standar dan Sasaran kebijakan.**

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi miti interpretasi dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen Implementasi.

### **b. Sumber Daya**

Implementasi pusat informasi dan konseling perlu adanya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan PIK.

### **c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Dalam Implementasi PIK perlu dukungan, kordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.

#### d. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi pelaksanaan pusat informasi dan konseling.

#### e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan PIK, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi pelaksanaan pusat informasi dan konseling tersebut, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik atau mendukung Implementasi kebijakan.

#### f. Disposisi Implementor

Disposisi ini mencakup tiga hal, yakni: a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) kognisi yakni pemahan terhadap kebijakan, dan c) intensitas disposisi implementor, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh implementor. Jika di dalam pelaksanaan PIK sudah mencakup dalam tiga hal tersebut maka implementasi kebijakan akan dapat terlaksana.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2011: 86). Lokasi dalam penelitian ini yaitu BKBPP Kota Bandar

Lampung, Universitas Lampung, Universitas Muhamadiyah Lampung, Sekolah Al-Mutaqin Bandar Lampung serta Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena di Provinsi Lampung ini sendiri merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara yang terkenal sebagai kota metropolitan di mana seperti lazimnya kota besar sangat banyak kenakalan remaja yang terjadi di sana. Secara geografis Provinsi Lampung juga merupakan pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa melalui darat. Sehingga besar sekali kemungkinan remaja di Kota Bandar Lampung terpengaruh hal-hal yang tidak baik dari kota besar seperti Kota Jakarta, atau terpengaruh hal yang tidak baik dari pendatang yang masuk ke Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011: 308). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. teknik yang digunakan dengan memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah

catatan kecil peneliti, pedoman wawancara serta *handphone* untuk *recorder* dan kamera. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk memahami sudut pandang dan pengalaman dari narasumber yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Di dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PIK dalam menangani masalah kenakalan remaja.

**Tabel 4. Data Informan**

NO	Nama	Data Informan
1.	Ir. Bambang Sumantri	Kasubid Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
2.	Dewi Windayani S.E	Bagian Bidang Penggerakan Masyarakat KB Kota Bandar Lampung
3.	Erika Widiastuti	Wakil Ketua PIK Universitas Lampung
4.	Riska Juliantika	Ketua PIK UM Lampung
5.	Siti Hardian	Ketua Sekolah AL-Mutaqin
6.	Wayan S.sos	Kecamatan Teluk Betung Utara (Gulak Galik)

*Sumber: peneliti tahun 2015*

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik observasi tak berstruktur yaitu sebuah observasi yang dipersiapkan secara

sistematis tentang apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengamati dan menganalisis kegiatan atau program PIK yang dijalankan oleh pihak BKKBN Kota Bandar Lampung.

### 3. Dokumentasi

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah diolah atau ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang bersangkutan. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa: Data *website*, Literatur tentang implementasi, Peraturan perundang-undangan, Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa PIK R/M, Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, dan Laporan kegiatan PIK, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2015.

### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119-120) tahapan-tahapan analisis data adalah :

#### a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan Riset. Dalam kegiatan

Riset ini, peneliti mencari data-data yang terkait dengan program PIK yang dijalankan oleh BKKBN Kota Bandar Lampung.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekaman hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui *recorder* maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi program PIK dalam menangani masalah kenakalan remaja yang dilakukan BKKBN Kota Bandar Lampung.

c. Tampilan Data (*Data Display*)

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto yang di peroleh dari BKKBN mengenai program PIK Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

#### d. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program PIK dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

#### 1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

##### a. Triangulasi

Dalam tehnik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mathinson dalam Sugiyono (2011:332) nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data.

c. Ketekunan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

d. Analisis kasus negatif

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan cara mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembandingan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses

penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak *reliabel* atau *dependable*.

4. Kepastian (*confirmability*)

Pengujian kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Mengujian kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan.

#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Bandar Lampung**

###### **1. Profil BKBPP Kota Bandar Lampung**

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pada Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada Pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah yang disingkat BKKBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota.

Di Kota Bandar Lampung BKKBN mengalami perubahan nama namun tugas dan fungsi yang dijalankan masih tetap sama. Sebelum menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP), instansi ini memiliki nama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Bandar Lampung, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memegang peranan yang sangat menentukan dalam bekerjasama dengan masyarakat dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk.

## **2. Visi dan Misi**

Visi kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung yaitu “Mewujudkan Keluarga Yang Ideal Berkualitas Serta Kualitas Hidup Perempuan Kesetaraan Dan Keadilan Gender 2014” dan untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat Misi yang dapat menunjangnya, di mana misi tersebut adalah:

- (1) Menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian peran serta masyarakat dalam rangka pembudayaan keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 2) Melakukan perencanaan keluarga secara cermat sehingga penambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindari, dan setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya secara cermat dan bertanggung jawab.
- 3) Meningkatkan upaya pemberdayaan Perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 4) Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarus Utamaan Gender (PUG) pada lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- 5) Pengelolaan kebijakan perlindungan tindak kekerasan perempuan, lanjut usia, penyandang cacat dan anak.

### **3. Program PIK (Pusat Informasi dan Konseling)**

Program PIK adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi. Program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dilaksanakan berkaitan dengan bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja dimaksud, yakni mempraktekkan hidup secara sehat (*practice healthy life*). Empat bidang kehidupan lainnya yang akan dimasuki oleh remaja sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya remaja mempraktekkan kehidupan yang sehat. Dengan kata lain apabila remaja gagal berperilaku sehat, kemungkinan besar remaja yang bersangkutan akan gagal pada empat bidang kehidupan yang lainnya penyiapan kehidupan berkeluarga.

### **4. Tujuan Pusat Informasi dan Konseling (PIK)**

PIK Remaja bertujuan untuk memberikan informasi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), Pelayanan Konseling dan Rujukan PKBR. Pengertian dan Batasan :

- a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK Remaja adalah nama generik. Untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja, nama

generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat.

- b. Kesehatan Reproduksi Remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi, komponen, dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual.
- c. PKBR adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu Remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko TRIAD KRR (Sexualitas, Napza, HIV dan AIDS), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.
- d. TRIAD KRR adalah 3 resiko yang dihadapi oleh remaja yaitu resiko-resiko yang berkaitan dengan Sexualitas, Napza, HIV dan AIDS.
- e. Resiko Sexualitas adalah sikap dan perilaku seksual remaja yang berkaitan dengan Infeksi Menular Seksual (IMS), Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, dan resiko perilaku seks sebelum menikah.
- f. HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, yaitu virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia.
- g. AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, yaitu kumpulan dari berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu yang didapat akibat HIV.
- h. Napza adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, yaitu zat-zat kimiawi yang dimaksudkan kedalam tubuh manusia baik

secara oral (melalui mulut), dihirup (melalui hidung), atau disuntik yang menimbulkan efek tertentu terhadap fisik, mental, dan ketergantungan.

- i. Remaja (*Adolescent*) adalah penduduk usia 10-19 tahun (WHO); Pemuda (*Youth*) adalah penduduk usia 15-24 tahun (UNFPA); Orang Muda (*Young People*) adalah Penduduk usia 10-24 tahun (UNFPA dan WHO); Generasi Muda (*Young Generation*) adalah penduduk usia 12-24 tahun (*World Bank*). Remaja sebagai sasaran program PKBR adalah penduduk usia 10-24 tahun yang belum menikah.
- j. Pendidik Sebaya PKBR adalah remaja yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan Pendidik Sebaya PKBR dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum Standar yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis.
- k. Konselor Sebaya PKBR adalah Pendidik Sebaya yang punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling PKBR bagi kelompok remaja sebayanya yang telah mengikuti pelatihan konseling PKBR dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum Standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis.
- l. Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum Standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya.

- m. Pembina PIK Remaja adalah seseorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah remaja, memberi dukungan dan aktif membina PIK Remaja, baik yang berasal dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kepemudaan/remaja lainnya.
- n. Pendidikan PKBR adalah suatu proses penyampaian informasi atau pendidikan PKBR yang dilakukan oleh Pendidik Sebaya untuk membantu remaja sebayanya dalam memahami tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.
- o. Konseling PKBR adalah suatu proses konsultasi dimana seorang Konselor Sebaya membantu remaja sebayanya untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan PKBR.
- p. Tegar Remaja adalah remaja-remaja yang menunda usia pernikahan, berperilaku sehat, terhindar dari resiko Seksualitas, Napza, HIV dan AIDS, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.
- q. Keterampilan Hidup (*Life Skills*) menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 adalah pendidikan non formal yang memberikan keterampilan non formal, sosial, intelektual/akademis, dan vokasional untuk bekerja secara mandiri. *Life Skills* yang dikembangkan dalam program PKBR lebih ditekankan pada Life Skills yang berkaitan dengan keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan (*vocational*), dan keterampilan menghadapi kesulitan.

## **5. Pelaksana PIK**

Program PIK (Pusat Informasi dan Konseling) dibuat berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang kemudian harus dijalankan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP), dan oleh Kabid BKKBPP Kota Bandar Lampung program ini dibebankan kepada Petugas Lapangan, di tiap-tiap kecamatan di Bandar Lampung, yang kemudian didampingi oleh rekan-rekan mahasiswa/ pemuda-pemuda beserta siswa dan siswi yang sebelumnya dibina dengan diberi pelatihan guna ikut berperan dalam pelaksanaan program.

## **6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) dipimpin oleh seorang kepala kantor dan dibantu oleh sekretaris serta berbagai Sub. Bagian, Bidang dan Sub. Bidang. Berikut ini beberapa tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja :

### **a. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan juga menjalankan fungsinya yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta kesekretariatan Badan.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

a) Penyusunan penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

c) Pelaksanaan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dibantu oleh:

e) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

f) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

4) Masing-masing Sub dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

**c. Sub Bidang Keluarga Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga Sub Bidang Keluarga Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga memiliki tugas yakni:**

- 1) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- 2) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan keluarga yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK).
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**d. Bidang Penggerakan Masyarakat**

- 1) Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Penggerakan Masyarakat meliputi pendampingan dan pemberdayaan masyarakat serta advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
- 2) Bidang penggerakan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

c. Pelaksanaan evaluasi kebijakan program penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3). Pasal ini Bidang Penggerakan masyarakat dibantu oleh:

a. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

**e. Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Sub bidang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas meliputi:**

1) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pendampingan institusi masyarakat.

2) Melakukan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan institusi masyarakat dan peningkatan peran serta.

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**f. Sub Bidang Perlindungan Anak**

Memiliki tugas:

1) Mengumpulkan dan menganalisa perlindungan anak.

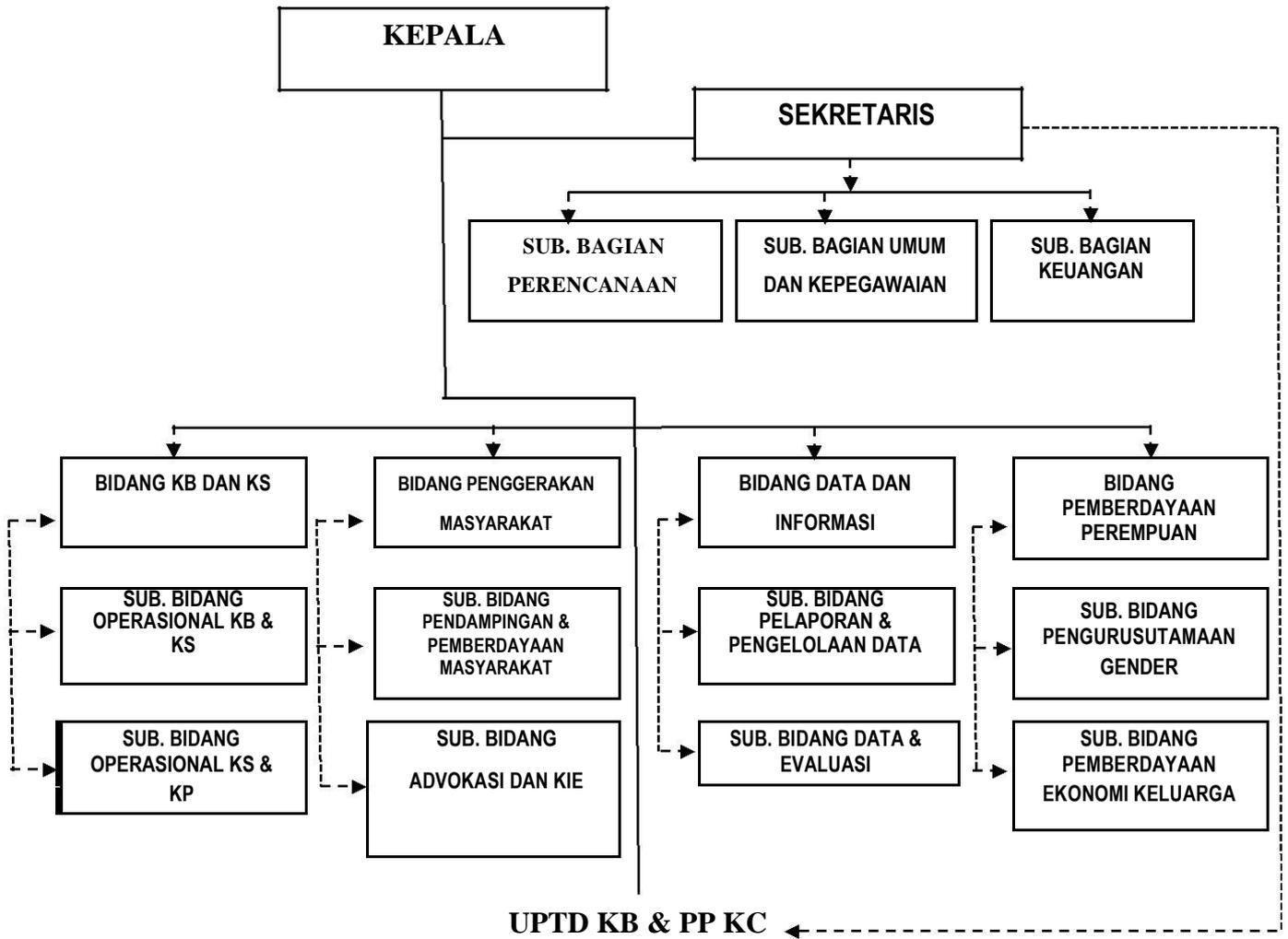
2) Menyiapkan bahan kebijakan di bidang perlindungan anak.

3) Melaksanakan penyusunan program perlindungan anak.

4) Melaksanakan program rintisan dalam rangka perlindungan anak.

- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan pengelolaan perlindungan anak.
- 6) Pemantauan pelaksanaan program perlindungan anak pengkajian berbagai dampak pembangunan.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung**



Sumber: Kantor BKBPP Kota Bandar Lampung

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Pusat Informasi dan Konseling (PIK) dalam upaya mencegah terjadinya kenakalan pada remaja dapat dilihat dari standar dan sasarnya sudah berjalan cukup baik, namun dilihat dari segi sumber daya manusia dan non manusianya belum dikatakan baik untuk terlaksananya PIK ini, selain itu komunikasi belum cukup baik, sehingga membuat PIK di daerah TBU tidak berjalan dengan efektif dan efisien, komunikasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara program harus jelas. Dapat kita lihat adanya *Standar Operation Prosedur (SOP)* yang dibuat berdasarkan pedoman yang dirancang oleh BKKBN melalui peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional Nomor 88/PER/F2/2012. Didalam kondisi sosial ekonomi politik juga sangat berpengaruh untuk berjalannya program ini. Dan dapat dilihat dari disposisi implementor bahwa mereka telah memahami tujuan dan maksud dari adanya program tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat peneliti berikan dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. BKBPP sebaiknya lebih memperhatikan standar yang telah dibuat untuk menunjang keberhasilan terlaksananya PIK di tiap-tiap sekolah maupun universitas, dengan cara melalui penambahan atau pengkajian ulang mengenai standar-standar yang kurang.
2. BKBPP sebaiknya lebih memperbanyak jumlah sumber daya manusianya bagi tiap-tiap PIK yang ada serta lebih memperhatikan kebutuhan yang diperlukan untuk terselenggaranya PIK dengan lancar, dengan cara membuka *recruitment* yang bertujuan mengajak para remaja untuk ikut serta dalam PIK, atau melalui radio-radio yang ada di Kota Bandar Lampung.
3. Komunikasi antar organisasi perlu ditingkatkan dengan cara memberikan sosialisasi yang lebih baik lagi tentang PIK di tiap-tiap sekolah atau universitas, serta mengadakan rapat terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya salah paham dalam komunikasi.
4. Agen pelaksana sebaiknya lebih bersikap responsif lagi untuk mensosialisasikan PIK ini, dengan cara lebih memahami SOP yang telah dibuat.
5. BKBPP sebaiknya lebih memperhatikan anak-anak remaja yang masih perlu arahan yang baik, karena kondisi sosial ekonomi politik sangat berpengaruh timbulnya kenakalan pada remaja, dengan cara mengarahkan anak-anak untuk

ikut PIK tersebut dengan harapan menjadikan generasi remaja yang berkualitas.

6. Implementor sebaiknya lebih memahami pedoman yang telah dibuat oleh BKKBN itu sendiri, dengan cara mempelajari SOP yang telah dibuat, para implementor harus lebih menguasai bagaimana cara untuk merangkul seorang remaja dalam berpartisipasi pada Pusat Informasi dan Konseling agar mereka mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Agustino, L. 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.Jakarta
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuhbelas, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan , Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Elekmedia Komputindo, Jakarta.
- Subarsono, A.G. 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Lampung*
- Usman dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, S. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Buku Kita, Jakarta.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam pasal 48 ayat (1).

## **C. Dokumen**

Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa

PIK R/M (PIK Remaja/Mahasiswa) *Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi*, Jakarta 2009.

## **D. Website**

[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)